

## **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah)**

*The Influence of Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standards and Government Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Reports (Study on BPKAD Central Sulawesi Province)*

Irmawati Hamruna<sup>1\*</sup>, Zakir Muhammad<sup>2</sup>, Rahman Thaher<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu

(\*)Email Korespondensi: [hamrunairmawati@gmail.com](mailto:hamrunairmawati@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah sehingga diharapkan kualitas kerja yang dihasilkan lebih tinggi dan berujung pada puasnya masyarakat dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian dari pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari pengujian menunjukkan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

**Kata Kunci:** Sumber Daya Manusia; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah; Laporan Keuangan

### **Abstract**

*The development of competency-based human resources will increase the productivity of government employees so that it is hoped that the quality of work produced will be higher and lead to the satisfaction of the community and the organization will benefit. Competency-based human resource development is carried out in order to provide results in accordance with organizational goals and objectives with predetermined performance standards. The method used in this research is descriptive and verification method with a quantitative approach. This study shows that testing shows that HR Competence, SAP Implementation and Government Internal Control Systems have a significant influence on the Quality of Financial Reports at the BPKAD office in Central Sulawesi Province. Then the test shows that HR Competence has an insignificant effect on the Quality of Financial Reports at the Central Sulawesi Province BPKAD office. Furthermore, the test shows that the application of SAP has a significant effect on the Quality of Financial Reports at the BPKAD office in Central Sulawesi Province. And the test shows that the Government's Internal Control System has an insignificant effect on the Quality of Financial Reports at the Central Sulawesi Province BPKAD office.*

**Keywords:** Human Resources; Implementation of Government Accounting Standards; Financial statements

## PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memasuki paradigma baru dimana tujuan dari penyelenggaraan pemerintah adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel, dalam hal ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan perubahan yang mendasar dalam mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu indikator dari *good governance* adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (1).

Berdasarkan fenomena yang ada bahwa pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini masih buruk, hal ini tidak terlepas dari faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Keterbatasan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas (2). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada SAP (3).

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (4). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan baik dan benar.

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan suatu aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber daya manusia akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat bagaimana kompetensi mereka yang sebenarnya (5). Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah sehingga diharapkan kualitas kerja yang dihasilkan lebih tinggi dan berujung pada puasanya masyarakat dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu, kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor yang dapat menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tinggi juga sangat ditentukan oleh seberapa baik penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah. sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP yang lemah akan menjadi penyebab sulitnya mendeteksi jika terjadi kecurangan/ketidakakuratan proses penyusunan laporan keuangan sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan dan berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, hal ini ditentukan oleh penerapan SPIP yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eri Listyani (2019) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (6).

Laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu, proses penyusunannya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan karena laporan tersebut akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah dilakukan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen-komponen dalam laporan keuangan yang wajib disampaikan terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (7).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah).

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diperoleh dari kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan kuisisioner.

Pengujian instrument yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji kualitas data, transformasi data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedasitas. Sedangkan metode pengalaisaan data dalam penelitian ini melalui analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut: 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah. 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah. 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Kas dan Aset Daerah. 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah. 5) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji F (Uji Pengaruh Simultan)

Hasil uji F atau ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,594. Jika dibandingkan dengan Ftabel maka Fhitung lebih besar dari Ftabel ( $15,584 > 2,950$ ) dan tingkat signifikansi kurang dari taraf nyata 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan SPIP secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan SPIP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan pada Kantor BPKAD provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang terdiri Dari Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah terbukti terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan.

#### Uji t

Dapat diinterpretasikan hasil Uji t dari variabel NPL dan GCG dapat diuraikan : 1) Nilai  $t_{hitung}$  pada variabel Kompetensi SDM ( $X_1$ ) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,830 < 2,048$ ), dan tingkat signifikan sebesar 0,078 yang berarti lebih besar dari taraf sebesar 5% ( $0,078 > 0,05$ ). Dengan demikian nilai ini

memberikan makna bahwa secara parsial variabel Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM secara parsial mempunyai pengaruh yang Tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Nilai  $t_{hitung}$  pada Penerapan SAP ( $X_2$ ) lebih Besar dari  $t_{tabel}$  ( $3.110 > 2,048$ ), dan tingkat signifikan sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari taraf alfa 5% ( $0,004 < 0,05$ ). Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa Penerapan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uji-t hipotesis penelitian tersebut, yang menyatakan bahwa Penerapan SAP secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai  $t_{hitung}$  pada SPIP ( $X_3$ ) lebih Kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1.515 < 2,048$ ), dan tingkat signifikan sebesar 0,141 yang berarti lebih besar dari taraf alfa 5% ( $0,141 > 0,05$ ). Dengan demikian nilai ini memberikan makna bahwa SPIP mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uji-t hipotesis penelitian tersebut, yang menyatakan bahwa SPIP secara parsial mempunyai pengaruh yang Tidak signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan SPIP secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kompetensi SDM merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Jika kompetensi SDM memadai maka tugas dan pekerjaan dapat dengan mudah diselesaikan.

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh Penerapan SAP yang optimal, karena SAP merupakan standar yang telah mengatur tentang proses akuntansi yang ada di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain penerapan SAP yang optimal, maka harus ditunjang oleh SPIP yang memadai dalam mengendalikan semua unsur-unsur yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan adanya SPIP yang memadai. SPIP terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung dan Novita Indrawati (2020) yang mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh Kompetensi SDM, penerapan SAP dan SPIP yang memadai (8).

### **Pengaruh Kompetensi SDM terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.**

Hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh Pegawai yang ada pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti tidak semua aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pegawai dituntut untuk dapat memahami penyusunan laporan dengan menggunakan sisten dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai, sehingga banyak diantaranya pegawai yang duduk

pada posisi sebagai tenaga staf tidak memahami benar proses penyusunan laporan keuangan, terlebih lagi kepala bidang akuntansi yang memiliki latar belakang Pendidikan bukan akuntansi.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar kualitas laporan keuangan dapat terpenuhi. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah tidak menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya transparansi, reabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pengauditan, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Pemerintahan diberlakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam laporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan Standar Akuntansi Pemerintah yang kredibel. Perkembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2005 bahwa untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (9).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun para pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal yang perlu dipahami dan dipatuhi dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan proses akuntansi dilingkungan pemerintah yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan (10). Hal ini dimaksudkan agar para pengguna laporan dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa SPIP mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan belum diterapkannya unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang meliputi penguatan pengawasan, pemisahan tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Jadi, untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah yang baik, seharusnya unsur-unsur tersebut juga berjalan dengan baik.

Selain itu, sistem pengendalian intern (SPIP) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012). Sistem pengendalian intern menjadi patokan awal apabila ditemukannya adanya temuan dalam laporan keuangan, sehingga peran dari sistem pengendalian intern dituntut untuk bekerja secara objektif dan independen untuk menghindari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (11).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian dari pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari pengujian menunjukkan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

### **SARAN**

Rekomendasi saran, sebaiknya kompetensi SDM yang melakukan penyusunan laporan keuangan perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan tentang akuntansi. Selanjutnya pemahaman tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan di lingkungan kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditingkatkan, sehingga proses penyusunan laporan keuangan kriteria-kriteria kualitas yang diharapkan. Dan penerapan tentang Sistem Pengendalian Internal di lingkungan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditingkatkan, sehingga proses penyusunan laporan keuangan memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang diharapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Sulistiani D. Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA J Akunt.* 2017;8(1):1–15.
2. Andini D. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *J Ekon KIAT.* 2015;26(1):65–82.
3. Rahmanurrajjid A. Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro; 2008.
4. Diani DI. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *J Akunt.* 2014;2(1).
5. Ghozali I, Iswati S, Adam S. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Organisasi di PT. Pertamina Lubricant Jakarta. *J Ekonika J Ekon Univ Kadiri.* 2020;5(2):211–23.
6. LISTYANI ERI. PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan). Universitas Mercu Buana Jakarta; 2019.
7. Arifin M. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Study Kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2013). STIE Widya Gama Lumajang; 2015.
8. Fathia N, Tanjung AR, Indrawati N. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal

- Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). PEKBIS. 2020;12(1).
9. Odekamaru JC, Ilat V, Sabijono H. Peralihan PP Nomor 24 Tahun 2005 Ke PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. J Berk Ilm Efisiensi. 2015;15(02).
  10. Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. Standar Akunt Pemerintah. 2010;
  11. Indonesia PR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008;